

# Analisis Implementasi Kebijakan Pengenaan Kompensasi Terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangun di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Ady Saputro<sup>a,1\*</sup>, Achmad Lutfi<sup>b,2</sup>

<sup>a,b</sup>Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Administrasi, Program Studi Kebijakan Publik  
e-mail: <sup>1</sup>adydki22@gmail.com\*, <sup>2</sup>achmad.lutfi@ui.ac.id  
\* corresponding author

## ARTICLE INFO

## ABSTRACT

*This study discusses the space on the coefficient of the building floor, especially buildings in the DKI Jakarta area in the study of the application of the policy of imposing compensation for exceeding the building floor coefficient value and the factors that influence the implementation of policies within the DKI Jakarta Provincial Government. The purpose of this study is to analyze the implementation of the policy regarding the imposition of compensation for exceeding the building floor coefficient value and find factors that hinder the implementation of the policy implementation. This study uses the theory of Street Level Beauracrats from Michael Lipsky and the theory of influencing factors from Grindle. This research was conducted through an approach through interviews and study literature. This one of the study indicate that the implementation of the policy has been going well, and the community is enthusiastic in responding to every policy issued by the DKI Jakarta Provincial Government. Then a factors that influence the implementation of the policy are the strategic actors involved in formulating policies*

### Keywords

Implementation, policy, stakeholder

## PENDAHULUAN

Wilayah DKI Jakarta ialah salah satu kota di Indonesia yang mendapat tempat tersendiri dalam peta gedung pencakar langit dunia. Ibukota Jakarta sebagai fokus utamanya ini mampu menyelesaikan pembangunan tujuh gedung tinggi di atas dua ratus (200) meter (*tall buildings*) sepanjang pada tahun 2015 lalu. Dapat kita ketahui bahwa di Kota Jakarta untuk mendapatkan proses izin pembangunan gedung tinggi cukup sulit (JPI : 2017), berikut merupakan faktor yang berpengaruh terhadap perizinan pembangunan gedung tinggi di Jakarta dinilai kompleks yakni sejumlah peraturan yang bersifat kompleks. Peran SKPD yang terlibat dalam proses penerbitan perizinan membutuhkan hubungan yang baik sehingga memudahkan pelaksanaan, jangka waktu yang relatif lama dikarenakan jumlah keterbatasan sumber daya manusia, dan biaya pengeluaran yang relatif tidak sedikit dalam mengurus perizinan bangunan sehingga berpengaruh terhadap sektor properti. Perizinan pembangunan yang dimakaud mencakup kualitas, fungsi, amplop ruang. Namun jika terdapat kelebihan luas bangunan setiap pengembang property diwajibkan untuk membayar sejumlah denda atau kompensasi berdasarkan Pergub 210/2016 tentang pengenaan kompensasi terhadap pelampauan nilai KLB. Dengan cara ini Pemprov DKI Jakarta dapat mendorong para pengembang untuk lebih taat aturan dan tertib dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diberikan. Berikut terdapat lima gedung pembangunan yang sedang dalam tahap pembangunan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kota Jakarta nantinya akan memiliki gedung pencakar langit yang

pembangunannya akan rampung pada tahun 2022 yaitu gedung signature tower jakarta dengan ketinggian 650 meter (*talls building*). Berikut gambar pembangunan gedung pencakar langit di Jakarta :

**Tabel 1.1**  
**Faktor Problematik di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta**

No	Tahun	Faktor
1.	2014	Dana kompensasi KLB yang sulit diawasi
2.	2015	Tidak transparan
3.	2016	Regulasi cenderung lemah
4.	2017	Regulasi yang sudah ada tidak selaras dengan kebijakan

Sumber Tabel 1.1 : Asisten Pemb.dan LH Sekda Provinsi DKI Jakarta, 2014

Fakta diatas memperlihatkan masalah utama yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, ialah berkaitan dengan kebijakan dan birokrasi. Dana kompensasi KLB yang difungsikan untuk pembangunan fasilitas publik sangat sulit untuk diawasi. Karena, dalam penggunaan dana kompensasi KLB itu tidak melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ,mengingat dana kompensasi KLB tidak masuk dalam struktur APBD. Sehingga dalam pembangunan fasilitas publik, DPRD tidak pernah terlibat untuk menentukan skala prioritas dalam menggunakan dana kompensasi KLB tersebut.

## KERANGKA TEORI

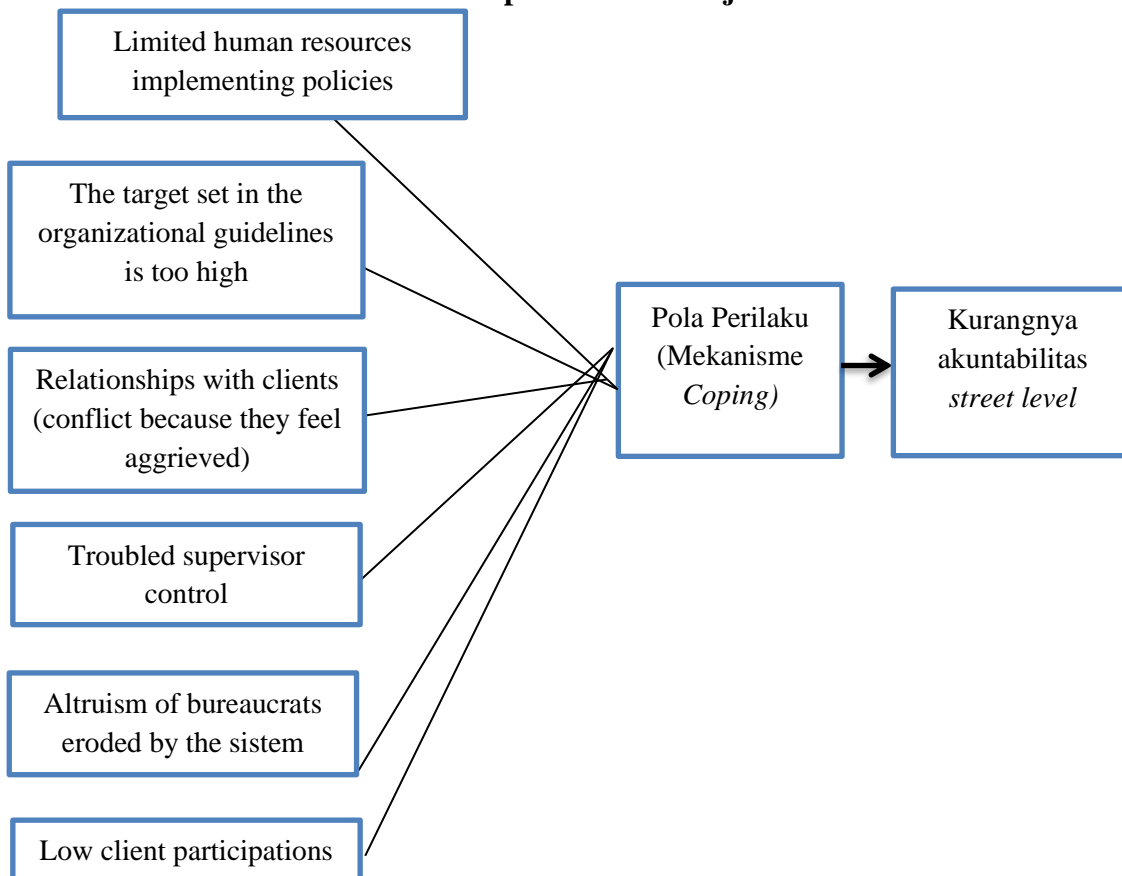
### Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan mempunyai banyak makna yang berbeda-beda, jika merujuk kepada berbagai pendapat ahli bahwa fungsi dari suatu implementasi kebijakan itu tidaklah hanya menggambarkan satu macam, sehingga pada prinsipnya tidak ada penjelasan yang dapat dipahami secara seragam atau sama. Dalam faktanya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan sering bersinggungan dengan unsur politiknya dengan adanya berbagai kepentingan atau intervensi yang bersaing didalamnya. Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang bersifat dinamis mengikuti perkembangan jamannya, dimana pelaksana kebijakan melakukan kegiatan sehingga hasil yang didapat sesuai dengan sasaran kebijakan itu sendiri (Agustino, 2008:76). Menurut pandangan yang dijelaskan oleh Gordon (1986) suatu implementasi berkaitan dengan semua proses kegiatan yang mengarah pada realisasi suatu program. Memasuki era desentralisasi dimana sebuah konsep memiliki pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan maksud untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di suatu daerah. Tetapi era seperti itu khususnya di Ibukota Jakarta sering sekali memicu permasalahan politik lokal yang begitu kompleks (Keban, 2008:76). Pemprov DKI Jakarta menyediakan pelayanan publik bagi warga DKI Jakarta yang ingin mengurus atau memperoleh perizinan dan non perizinan diberbagai bidang perizinan, dengan klasifikasi rumpun yang berbeda yang diselenggarakan oleh SKPD DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta. Memang pada praktinya sering sekali dalam hal pengurusan perizinan ditemukan pengaruh politik lokal. Itu sebabnya dalam era desentralisasi menggunakan pola demokrasi yang diterapkan. Penelitian ini menggunakan teori *Street level bureaucracy*. Cara bekerja dari model ini yaitu dengan mengidentifikasi jaringan aktor yang terlibat dalam proses pelayanan. Model ini didasarkan pada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasinya, dengan melibatkan pemimpin tertinggi pemerintahan namun hanya pada

tataran rendah. Teori ini diinisiasi oleh kelompok masyarakat baik secara langsung maupun organisasi kemasyarakatan. Terlebih menurut identifikasi Lipsky dalam Widaningkrum, *street level* mempunyai suatu karakteristik bekerja dalam rutinitas yang tak tentu dan dibawah tekanan/tuntutan serta memiliki kewenangan diskresi dan interpretasi kebijakan. Tipologi tersebut menjadikan ia sangat strategis dan rentan untuk diintervensi kepentingan dari para aktor lokal yang bermain. Salah satu cara untuk mengetahui tingkat *power* yang digambarkan oleh Lipsky dalam menganalisa mengenai birokrat (*street level bureaucrat*) yaitu dengan menjabarkan operasionalisasi konsep dalam penelitiannya dengan tujuan untuk memberikan pemahaman tentang kajian ilmiah. Kajian ini menggambarkan pemahaman mendalam terkait pengetahuan berdasarkan pada sumber yang bersifat sekunder yang relevan dengan studi kasus. Pandangan Lipsky tentu saja membuat setiap masyarakat yakin bahwa kendala yang dihadapi oleh birokrat garis depan merupakan salah satu cita-cita masyarakat, yaitu persyaratan dari suatu instansi/lembaga, dan sebuah implementasi yang bersifat nyata berdasarkan dari suatu kebijakan yang relevan dengan pelayanan publik melayani masyarakat secara berkelanjutan dengan mengikuti perkembangan zaman, hal tersebut diatas dapat dipahami bahwa apa yang disebut dengan *street level bureaucrat* Berikut dapat kita lihat pola pemikiran yang dijelaskan oleh Michael Lipsky.

**Gambar 1.2**

**Model Implementasi Kebijakan**



Gambar 1.2 : Telah diolah kembali dari Michael Lipsky (1980)

*Street level bureaucracy* membahas tentang birokrasi pelayanan publik yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Dimana setiap peran dari level bawah yang terlibat mempunyai karakteristik yang berbeda dalam mengambil keputusan dengan membuat kebijakan yang bersifat langsung dan

alokatif terhadap reaksi masyarakat (Nurmandi,2010). Realitas administrasi publik dalam birokrasi “*streetlevel*” adalah bahwa ia tidak dapat beroperasi secara hirarkis karena badan tersebut harus bergantung pada *street-level* birokrat untuk memberikan pelayanan publik. Sebagaimana birokrat tingkat jalanan dipaksa untuk mengembangkan mekanisme untuk klien karena keterbatasan sumberdaya dan kondisi kerja, maka sikap negatif yang berkembang. Lipsky mengusulkan upaya perubahan yang mengarah kepada administrasi publik yang memberikan peluang bagi peran level bawah untuk mempunyai sikap lebih simpatik dan responsif terhadap dukungan individu masyarakat (Kholifah, 2013)

### Faktor Implementasi Kebijakan

Dalam penelitian ini teori utama yang digunakan sebagai pisau analisis pembahasan adalah dengan menggunakan teori dari Grindle (1980) untuk menganalisis faktor apa saja yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan dilingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Teori tersebut sebagaimana yang telah diturunkan menjadi operasionalisasi konsep pada bagian metode penelitian. Model Grindle (1980) dapat di jelaskan bahwa kesuksesan suatu kebijakan dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteksnya. Dalam isi kebijakan mencakup enam hal yang mempengaruhinya. Keenam tersebut meliputi ***Kepentingan yang berpengaruh***, setiap kebijakan yang akan diimplementasikan melekat dengan berbagai kepentingan baik untuk menguntungkan diri sendiri maupun mencari keuntungan untuk sebuah organisasi. Dinilai sangat kompleks tentunya hal ini dapat mempengaruhi implementasi dimasa yang akan datang. ***Manfaat yang dihasilkan***, suatu kebijakan harus memiliki dampak positif yang dapat dirasakan oleh masyarakat umum ataupun ASN dilingkungan Pemprov DKI Jakarta. Suatu kebijakan yang berhasil berkaitan erat dengan tipe atau jenis kemanfaatan yang dinikmati oleh kelompok sasaran. ***Perubahan yang diinginkan***, dalam suatu organisasi tentu saja mempunyai tujuan tersendiri, sehingga sering menggunakan parameter dalam suatu perubahan yang hendak dicapai dan harus mempunyai skala yang jelas, hal ini menjadi penting guna mengetahui sejauh mana perubahan yang terjadi dan perubahan yang hendak dicapai. ***Posisi pengambilan keputusan***, dalam mengambil suatu keputusan peran dalam posisi pengambilan keputusan dalam pembuatan kebijakan mempunyai peran penting dalam meningkatkan kesuksesan implementasi kebijakan. ***Program implementors***, dalam menjalankan suatu kebijakan harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakanyang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. ***Sumber daya manusia***, Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

Konteks kebijakan mencakup hal-hal sebagai berikut ***kepentingan dan strategi aktor yang terlibat*** dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategy yang digunakan para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan.terutama bagi para pemimpin tertinggi yang memiliki kewenangan dalam mendorong implementasi kebijakan dilingkungan Pemprov DKI Jakarta. ***Institution and regime characteristic***, dimana kondisi lingkungan kebijakan yang dilaksanakan memberikan suatu pengaruh yang relevan dengan keberhasilan implementasi, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan. ***Compliance and responsiveness*** hal lain yang harus diperhatikan dalam proses perumusan kebijakan yaitu mengani respon dan kepatuhan para pelaksana maka yang hendak dijelaskan dalam poin ini adalah sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan. Model Grindle (1980), bila dipahami

model ini memberikan pandangan implementasi kebijakan secara komprehensif dan holistik, titik fokus yang menyangkut dengan pelaksana dan adanya konflik kepentingan yang sangat memungkinkan terjadi antara aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan serta suatu keadaan dimana sumberdaya implementasi yang diperlukan (Nugroho, 2008: 445). Disamping itu sesudah memahami pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi atau konten serta lingkungan maupun konteks yang diterapkan. Nantinya dapat kelihatan bahwa setiap pembuat kebijakan mampu bekerjasama sama dalam merumuskan kebijakan yang diharapkan, serta dapat dilihat keberhasilan implementasi sebagai faktor yang relevan dalam suatu kondisi lingkungan tertentu. Sehingga diharapkan suatu organisasi dapat mengalami perubahan sesuai dengan kondisi lingkungan yang berkembang (Agustino, 2006: 156).

**METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian yang digunakan ialah metode pengumpulan data secara kualitatif. Karena penelitain ini menggunakan teori sebagai pisau analisis disertai dengan variabel yang jelas. Disamping itu dapat menghubungkan tahapan-tahapan secara logis dengan berbagai pendapat ahli yang berbeda daripada suatu realitas yang tunggal (Cresswell, 2017:31). Penelitian ini menggunakan konsep teori Lipsky (1980) & Grindle (1980) sehingga menjadi teori utama dan sebagai pisau analisis yang akan diperasionalisasi dalam menganalisis penelitian ini. Operasionalisasi konsep dibuat bertujuan untuk menjawab penelitian ini menggunakan dua variabel dari Michael Lipsky (1980) & Grinde (1980) yang terdiri dari variabel implementasi kebijakan publik dan variabel faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Variabel dari faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari 2 (dua) variabel yaitu dengan menghasilkan 8 (delapan) indikator yang akan dianalisa oleh peneliti.

Tabel 1.2 Operasionalisasi Konsep

Konsep	Variabel	Dimensi/ Sub Variabel	Indikator
Kebijakan Publik	Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan khususnya kebijakan mengenai Peraturan Gubernur (Grindle,1980)	<i>Content of Policy</i>	1. Kebijakan yang dipengaruhi oleh suatu kepentingan 2. Derajat perubahan yang diinginkan 3. Tipe manfaat yang dihasilkan 4. Sikap & tindakan pelaksana 5. Posisi pembuat kebijakan 6. Keterlibatan sumber daya
		<i>Context of Policy</i>	1. Kepentingan, kekuasaan, & aktor yang terlibat 2. Karakteristik lembaga, kepemimpinan & struktur organisasi. 3. Kepatuhan serta daya tanggap pelaksana.
Sumber Tabel 1.2: Merilee S Grindle. <i>Politics and Policy Implementation in The Third World</i> , (1980) diolah oleh peneliti, 2020.			

**HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

**Hambatan Faktor Isi Kebijakan**

Faktor dalam penelitian ini menggambarkan terkait 6(enam) indikator, yaitu ***Pengaruh dari suatu kepentingan, derajat perubahan yang diinginkan, tipe manfaat yang dihasilkan, pelaksana program, kedudukan pembuat keputusan, sumber daya yang dilibatkan.*** Dari hasil 6 (enam) indikator yang diteliti diharapkan nantinya dapat dianalisa mengenai kendala yang terjadi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan dilingkungan Pemprov DKI Jakarta.

### ***Kebijakan yang dipengaruhi oleh suatu kepentingan***

Indikator ini menjelaskan tentang kepentingan yang tepengaruh sehingga dianalisa hal yang dapat menghambat dalam praktek implementasi kebijakan dilingkungan Pemprov DKI Jakarta mempengaruhi berbagai macam kepentingan atau memberikan dampak positif. Diamping itu akan dinilai juga bagaimana pengaruh kepentingan menjadi faktor krusial dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Dalam indikator ini faktor yang muncul adalah bahwa masih adanya anggapan dari perangkat daerah yang menentang kebijakan dengan mementingkan kepentingan kelompok. Birokrat yang semakin meluas dengan fungsinya, baik birokrat yang bersifat secara nasional maupun lokal dengan maksud untuk mencukupi tuntutan yang berkembang secara pembangunan dengan memicu suatu kelompok dalam masyarakat, untuk terlibat dalam isu tertentu. Kondisi tersebut sejalan dengan meratanya tingkat kesadaran politik. Serta peningkatan dalam hal keterampilan organisasional. Kasus seperti ini menunjukkan bahwa pertumbuhan area dimana pemerintah ikut terlibat dengan kepentingannya terutama dalam hal yang berkembang untuk mempengaruhi kebijakan Loomis (2011:181-182). Kepentingan mencakup kepentingan yang menguntungkan dan kepentingan yang merugikan, adapun kepentingan yang merugikan ialah Kutipan wawancara dengan Biro ORB berikut dapat memberikan pemahaman tentang tingkatan kepentingan. Korupsi merupakan suatu perilaku yang dapat merugikan kepentingan umum (publik) atau dengan motif mendapatkan keuntungan secara pribadi maupun kelompok (Syarbaini : 2011). Jika merujuk pada sisi politis, seseorang mungkin bisa terbilang melakukan korupsi dikarenakan beberapa tekanan, baik tekanan yang muncul dari orang terdekat maupun dari pihak luar, yang sering menuntut demi memenuhi kebutuhan hedonisme, bahkan korupsi bisa terjadi karena tekanan dari pemimpin maupun rekan kerja yang berada si satu lingkungan yang sama. *“power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely”* kekuasaan itu cenderung mengarah pada korupsi, kekuasaan mutlak maka mengakibatkan juga korupsi mutlak. Beberapa bentuk konflik kepentingan dapat menimbulkan suatu potensi korupsi seperti dalam bentuk kebijakan dan gratifikasi. Kepentingan yang terjadi dalam pembuatan kebijakan yaitu kepentingan yang sifatnya menentang, hal ini nantinya tentu dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Hal tersebut tidak berarti bahwa kepentingan perseorangan menjadi terdesak oleh kepentingan umum, melainkan antara kepentingan umum dan kepentingan perseorangan dapat berjalan secara seimbang. Namun, banyaknya kepentingan berpotensi mendatangkan konflik dan bibit pengaturan frekuensi itu sudah terlihat , Berikut penjelasan narasumber:

“..Kepentingan yang sifatnya menentang Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terutama yang merugikan kepentingan Pemprov DKI dan Warga DKI” (wawancara dengan narasumber, 6 April 2021)

Salah satu kekuatan penting dalam konfigurasi politik dimana pada fase tertentu dapat membuat dinamika sistem politis yaitu dengan dukungan dan adanya kelompok kepentingan. Mereka hanya sebatas pada agregasi kepentingan itu sendiri, dan merupakan suatu kelompok yang terstruktur

sehingga target bersama yang hendak dicapai secara aktif dapat mempengaruhi sistem pemerintahan (Janda, Berry & Goldman:1997), bisa disebut sebenarnya tujuan mereka yaitu dengan berusaha semaksimal mungkin untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan agar sesuai dengan maksud dan tujuan para kelompok tersebut. Pada dasarnya terdapat beberapa tipe kelompok dalam kepentingan yang aktif dalam masyarakat. Pola berfikir mereka selalu berusaha untuk memberikan pengaruh terhadap kebijakan pemerintah sebagai pemain non pemerintah, mereka dapat menyesuaikan sikap dengan profesional, organisasi keagamaan, asosiasi, dll. Mereka mempunyai sumber kekuatan yang berasal dari status keanggotaan serta sumber daya, dana & jaringan sosial yang dimiliki. Hal seperti ini yang kerap menjadi penentu agenda kebijakan, penggalang isu, serta turut berperan dalam merumuskan kebijakan dengan cara mendesak pemerintah.

### **Manfaat yang dihasilkan**

Setelah menganalisis indikator derajat perubahan yang diinginkan maka pembahasan selanjutnya mengenai indikator manfaat yang dihasilkan. Dalam menganalisis manfaat yang dihasilkan dari ketetapan kebijakan Pemprov DKI Jakarta yaitu tentu sangat membantu dan memberikan kemudahan terutama bagi pengembang yang ingin menambah pelampauan nilai KLB khususnya pada pembangunan gedung-gedung tinggi. Agar seharusnya suatu kepentingan dapat diperhitungkan sesuai dengan kebutuhannya demi tercapainya suatu tujuan dari organisasi. Berikut penjelasan lengkap Narasumber PT.Sinarmas Teladan *“Saya kira Pergub No.210/2016 ini kebijakan yang sangat mengakomodir masyarakat maupun pihak pengembang khususnya bagi kita yang tidak mempunyai kelebihan space lahan dari sisi kanan dan sisi kiri, maka diperbolehkan untuk menambahkan tingkatan jumlah lantai dengan kompensasi yang telah ditentukan.”* (wawancara dengan narasumber, 28 Mei 2021). Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat tentang implementasi kebijakan mengenai pengenaan kompensasi KLB, dalam hal ini manfaat yang substantial dan kultural yang seharusnya muncul masih belum nampak terlihat untuk dirasakan atau paling tidak dimengerti terlebih dahulu. Namun pada perubahan pergantian di era kepemimpinan Gubernur maka setiap program yang dibuatpun akan berubah mengiktui program kerja masing-masing kepala daerah

### **Perubahan yang Diinginkan**

Selain itu pandangan berbeda justru datang dari narasumber lain yang menyoroti terkait regulasi serta implementasi kebijakan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Yang pertama narasumber akan menjawab terkait dengan perubahan apa saja yang terjadi ketika proses pembuatan kebijakan berlangsung, berikut penjelasan lengkap dengan narasumber Biro Hukum

*“Filosofi dari Pergub No 210/2016 yaitu mengakomodir permohonan pelampauan pengenaan KLB dari pengembang ketika dia merasa koefisien lantai bangunannya kurang. Dulu aturannya memang belum secara spesifik diatur sehingga untuk mengakomodir itu diaturlah dengan pergub 210/2016 tentang Pengenaan Kompensasi jadi memang tujuan dari pergub 210 untuk mengakomodir permohonan perizinan dari pengembang terhadap kekurangan klb di bangunan-bangunan.”* (wawancara dengan narasumber, 21 Mei 2021) Merujuk pada pendapat narasumber diatas dalam pelaksanaannya kebijakan tersebut dibuat untuk mengakomodir setiap pengembang yang ingin membangun kelebihan KLB. Oleh karena itu aturan yang dahulu sudah ada kemudian disempurnakan kembali di dalam pergub 210/2016. Tentunya dalam setiap kebijakan yang telah ditetapkan terdapat proses atau tata cara yang harus dipenuhi terlebih dahulu, untuk mendapatkan izin pelampauan KLB.

Kemudian dalam melaksanakan implementasi kebijakan tentu menimbulkan pro dan kontra dari beberapa pihak terkait, hal ini memicu untuk terjadinya suatu perubahan. Perubahan tersebut tentunya ada yang bisa diterima oleh masyarakat.

### **Posisi Pengambilan Keputusan**

Selanjutnya akan dianalisa kedudukan pembuat keputusan, pada indikator ini menunjukkan apakah sudah sesuai setiap posisi dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dalam sebuah kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Terdapat beberapa orang yang berperan dalam merumuskan kebijakan, khususnya kebijakan mengenai Pergub No 210/2016 tentang Pelampauan Nilai Pengenaan Kompensasi KLB. Berikut penjelasan narasumber Biro PLH secara lengkap mengenai siapa saja yang terlibat yaitu "*Gubernur, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Biro PLH, DPMPTSP, DCKTRP, Biro Hukum, Inspektorat, BPAD..*" (wawancara dengan narasumber, 6 April 2021). Berdasarkan susunan organisasi tata kerja Gubernur sebagai pimpinan tertinggi yang dibantu oleh empat orang asisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengoordinasikan penyusunan kebijakan pemerintah daerah khususnya dibidang PUPR Tugas selanjutnya megordinasikan pengendalian dan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah lingkup asisten pembangunan dan lingkungan hidup. pengambilan masing-masing keputusan ada dalam kedudukan lingkup Asisten Biro Pembangunan dan Lingkungan hidup berdasarkan dengan rumpun tugasnya masing-masing dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup.

### **Pelaksana Program**

Sering disebut dengan sistem yang mencakup output, input & proses kebijakan. Output dari proses kebijakan ialah kinerja kebijakan, input kebijakan mencakup masalah yang didapati dalam suatu kebijakan atau program pemerintah, sedangkan proses kebijakan berawal dari perumusan formulasi kebijakan dan pelaksanaa kebijakan. Permasalahan dan formulasi kebijakan dapat disimpulkan sebagai proses politik yang dilakukan oleh kelompok tertentu yang sering membarikan tekanan & elit poltiik (Wahyudi, 2016). Pembahasan kebijakan publik selalu melekat dari berbagai usaha untuk mendukung suatu kebijakan publik tersebut. rangkaian kegiatan dimana kebijakan dirumuskan & ditetapkan merupakan pelaksanaan dari kebijakan publik Memang dari pelaksana program , masih perlu lagi upaya membangun terus komunikasi atau mengintensifkan komunikasi dalam tataran pelaksana. Berikut kutipan wawancara narasumber berikut : "*tinggal kita bagaimana ke sesama pelaksana gitu ya. Itu yang mungkin kurang. Memang kita dalam hal ini memang harus selalu saling menginfokan, berkoordinasi, komunikasi dengan para pelaksana sangat diperlukan*" (wawancara dengan narasumber, 23 Maret 2021).

Merujuk pendapat narasumber diatas diketahui bahwa belum pahamnya para pegawai di tataran pelaksana. Bahkan sampai sitataran pimpinan struktural pun belum memahami. Tentunya tidak terlepas dari bagaimana pelaksanaan komunikasi yang belum dilakukan secara masif dan intens menjadi penyebab persoalan pemahaman implementasi kebijakan belum sampai terasa di seluruh organisasi.



## Sumber Daya

Pada indikator ini dapat dilihat dari dua hal yaitu kompetensi & standar operasional prosedur. Sumber daya manusia mencakup 4 (empat) unsur yaitu pegawai yang mempunyai sifat dan sikap baik baik mutu dan secara kualitas, sejumlah informasi dibutuhkan dalam pengambilan keputusan, serta memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas atau tanggungjawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan, disposisi atau sikap pelaksana dari para aktor pembuat kebijakan merupakan komitmen pelaksana terhadap program, struktur birokrasi yang berdasarkan pada SOP yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan. Pada indikator sumber daya problem temuan di lapangan yaitu dengan mengeskplor kualitas SDM dengan bobot SDM yang memiliki kemampuan optimal dalam mendukung peningkatan kualitas dan mengakselerasi implementasi kebijakan dilingkungan Pemprov DKI Jakarta. Berikut penjelasan lengkap oleh narasumber BKD “..Bila dimaksudkan peningkatan sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan, maka bisa diprediksi lebih mengarah kepada kompetensi, pengetahuan/penguasaan pemahaman terhadap kebijakan. bagaimana bisa meningkatkan kompetensi dalam penerapan kebijakan, yaitu dengan sosialisasi terhadap para ASN termasuk pelatihan-pelatihan terhadap kompetensi penguasaan kebijakan terkait. Jika sebagai stakeholder dan decision maker, kompetensi saja tidak cukup namun juga membutuhkan : arahan yang jelas, peningkatan/pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kebijakan (landasan hukum, latar belakang dan kompetensi terkait lainnya, lingkungan dan pengalaman..” (wawancara dengan narasumber, 6 April 2021).

Merujuk pandangan narasumber diatas menunjukkan dari indikator sumber daya manusia mengenai pengembangan dan peningkatan kompetensi pegawai saja tidak cukup, selain itu membutuhkan arahan yang jelas dari para pelaksana. Pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemprov DKI Jakarta sebagai upaya pemerintah dalam mendukung peningkatan kualitas pegawai. Agar setiap isi kebijakan yang dihasilkan melibatkan pegawai yang berkompeten dibidangnya. Dengan mempunyai fungsi untuk meningkatkan integritas ASN dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan, meningkatkan komeptensi dan iklim kerja aparatur sipil negara dilingkungan Pemprov DKI Jakarta.

## Hambatan Faktor Konteks Kebijakan

Faktor konteks kebijakan akan dijelaskan terkait 3 (tiga) indikator, yaitu *Power, interest and strategy of actor involved, Institution and regime characteristic & Compliance and responsiveness*. Dimana dalam pelaksanaan implementasi kebijakan sering terdapat kendal yang dihadapi. Hal ini akan dianalisa berdasarkan teori Grindle (1980) dimana setiap konsepnya, peneliti akan mengkaji berdasarkan hasil studi dilapangan. Dapat diketahui juga faktor apa saja yang dominan dan yang tidak begitu dominan dalam konteks kebijakan. Terlebih lagi sangat melekat dengan kepentingan maupun rezim kekuasaan yang berpengaruh

## Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor

Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat dalam konteks kebijakan akan ditunjukkan bagaimana aktor yang terlibat lebih dilihat dari komitmen dan keterlibatan pimpinan dalam melaksanakan implementasi kebijakan dilingkungan Pemprov DKI Jakarta, dalam konsepnya ketika suatu kekuasaan, kepentingan dan strategi maka dominasi ketiga hal tersebut sangat didominasi

oleh pimpinan tertinggi yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Dimana pimpinan tinggi tersebut ialah Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Para Kepala Biro atau Kepala Dinas. Berkaitan dengan peran pemimpin dalam menggunakan kekuasaan dan mengelola berbagai kepentingan serta kaitannya menggunakan implementasi kebijakan publik menjadi hal yang krusial.

Oleh karena itu, dalam menganalisis indikator ini hal yang dominan untuk dianalisis mengenai bagaimana para pemimpin yang ada. Tentunya implementasi kebijakan berkaitan erat dengan peran sentral dari pimpinan tertinggi untuk menjadi orang pertama yang mengambil tanggungjawab dari suatu keputusan yang telah dibuat. Berikut penjelasan lengkap narasumber DPMPTSP :

“Aktor yang terlibat sudah pasti ada pemerintah dan ada masyarakat sebagai pemohon. Kalo dari masyarakat sendiri untuk pelampauan KLB ini ada kebijakan yang tertinggi nya itu ialah Rapim BKPRD , itu diputuskan langsung oleh gubernur. Suatu forum yang dihadiri oleh pemimpin dari masing-masing SKPD terkait, jadi ketika pemohon mengajukan permohonan keputusan iya atau tidaknya, dikaji ulang atau di telaah kembali itu ada di forum Rapim Bkprd. (wawancara dengan narasumber, 5 Februari 2021)

Dari penjelasan tersebut dapat dianalisis bahwa kekuasaan tertinggi dalam memutuskan kebijakan ialah Gubernur. Melalui forum Rapat Pimpinan BKPRD. menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan, sedangkan dalam menyelenggarakan fungsinya merupakan tupoksi dari BKPRD yang berperan sebagai penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja anggaran dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. kemudian pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya, serta pelaksanaan kesekretariatan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah. BKPRD mempunyai tugas dan tanggung jawab langsung kepada Kadis PMPTSP Provinsi DKI Jakarta.

Aktor yang terlibat dalam setiap penyusunan kebijakan yaitu SKPD terkait, dimana setiap SKPD teknis maupun non teknis mempunyai tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam membantu proses percepatan guna melancarkan menerbitkan suatu kebijakan. Salah satunya Biro PLH merupakan biro yang berperan penting dalam hal pembangunan dan lingkungan hidup. berikut penjelasan narasumber Biro PLH secara lengkap “..*Dalam merumuskan kebijakan dalam Pergub selalu melibatkan SKPD terkait, termasuk mengakomodir permasalahan dan keluhan dari pemohon KLB agar proses pelaksanaan kompensasi KLB dapat terlaksana dengan baik dan sesuai ketentuan serta menghindari adanya kepentingan golongan..*” (wawancara dengan narasumber, 6 April 2021)

Peran TGUPP sebagai *Key Players* yaitu TGUPP memiliki kepentingan yang kuat dan dapat mempengaruhi SKPD lainnya baik dari nilai organisasi, nilai politik, nilai pribadi, nilai ideologi dan nilai kebijakan. TGUPP adalah sebuah tim dan bukan merupakan perangkat daerah yaitu tim yang dibentuk dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik dengan fokus pada program prioritas gubernur. TGUPP secara operasional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada gubernur. Program prioritas gubernur merupakan suatu kepentingan khusus yang harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah diarahkan oleh gubernur. karena TGUPP mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Gubernur, memberikan pertimbangan, saran, dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan gubernur, dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan gubernur.

## Lingkungan Organisasi dan Rezim Kekuasaan

Saat ini akan dianalisa terkait **Lingkungan Organisasi dan Rezim Kekuasaan**. Dengan kata lain bahwa implementasi kebijakan tidak terlepas dari proses politik atau rezim kekuasaan. Citra pembangunan atau perubahan, yang dibangun oleh penulis bersifat sementara dan karenanya terbuka untuk direvisi. Pendekatan analisis kebijakan secara optimal dapat menggunakan kajian sejarah kebijakan untuk mengurai dua hal pokok yaitu kebijakan itu sendiri dan legitimasi pemerintah. Kebijakan atau sejarah rezim sendiri membatasi kebebasan memilih untuk pembuatan kebijakan. Hal tersebut merupakan pandangan dari penganut teori instutisional historis. Diakui juga bahwa pilihan yang dibuat diawal sejarah sebuah sistem atau peraturan pemerintah memiliki implikasi terhadap bagaimana sebuah kebijakan dapat berkembang. Secara khusus, pilihan yang dibuat ketika sebuah rezim atau kebijakan dibentuk akan berpengaruh yang terus berlanjut dan sangat menentukan mengenai kebijakan tersebut jauh ke masa depan (Goldstein dan Huang, 2016). Berbagai macam problematik dilapangan tergambar bahwa dukungan dan dorongan dari lingkungan organisasi seluruh perangkat daerah di Pemprov DKI Jakarta terkait implementasi kebijakan sudah berjalan dengan baik, memang dukungan ini tidak terlepas dari kualitas kemampuan dari masing-masing SKPD untuk mengoptimalkan pikiran dan keahliannya sesuai dengan tupoksinya. Dari hal tersebutlah yang memotivasi lingkungan organisasi dalam memberikan dukungan. Dengan demikian dukungan lingkungan eksternal yang ada lebih bersifat pragmatis. Berikut penjelasan lengkap narasumber Biro ORB

“Pada penerapan Peraturan Gubernur DKI Jakarta ada beberapa hal menjadi tolak ukur dalam penyusunan peraturan gubernur untuk di implementasikan kedepan oleh perangkat daerah pengampu . Pada implementasi kebijakan khususnya pergub di susun dengan menentukan perangkat daerah yang sesuai dengan tupoksinya yang di harapkan perangkat daerah tersebut sebagai pengampu, pada pengimplementasian Peraturan Gubernur dapat di lakukan penguatan dengan menerbitkan Instruksi Gubernur.” (wawancara dengan narasumber, 6 April 2021)

Birokrasi merupakan suatu bentuk organisasi dilematis, artinya dalam kondisi tertentu sepertinya ia tidak dibutuhkan tetapi ketika kondisi berubah menjadi kompleks dan luas ia mulai dibutuhkan. Dengan kata lain, menolak birokrasi atau menerimanya selalu mengandung resiko. Jadi permasalahannya sekarang hanyalah bergantung pada bagaimana melakukan penyesuaian berdasarkan perubahan situasi yang dialaminya

## Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana

Selanjutnya mengenai indikator kepatuhan dan respon para pelaksana. Apakah ditemui *causa prima* dari indikator kepatuhan dan respon para pelaksana saat mengimplementasikan kebijakan dilingkungan Pemprov DKI Jakarta. Respon pelaksana diihat berdasarkan bagaimana peran pelaksana dalam memenuhi dan menyiapkan data demi mendukung penilaian secara mandiri dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Dalam konteks ini dilihat apakah suatu responsivitas dan kepatuhan pelaksana sudah cukup baik dalam pemenuhan kewajiban implementasi kebijakan, hal ini dapat terlihat bagaimana para pelaksana dilingkungan Pemprov DKI Jakarta sangat mentaati ketentuan dan mekanisme yang sudah diatur. Hal ini tidak terlepas dari uraian dan temuan yang sudah dijelaskan dalam indikator sebelumnya. Menyebutkan kepatuhan pelaksana terhadap suatu kebijakan sangat berkaitan dengan isi kebijakan yang telah ditetapkan sehingga para pelaksana tidak

melakukan hal-hal yang diluar dari materi pokok kebijakan tersebut. Berikut penjelasan lengkap narasumber DPMPTSP :

“Sejauh ini sejak diterbitkan Pergub 210/2016 pelaksanaan semua berjalan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang sudah diatur di dalam Pergub 210/2016 dan tidak ada yang keluar dari situ, walaupun pada akhirnya kebijakan tetapi ada poin poin yang memang diatur dalam pergub itu misalkan seperti ketentuan indeks, dll. Untuk kriteria semuanya terpenuhi dulu baru pada akhirnya di bawa ke forum Rapim.” (wawancara dengan narasumber, 5 Februari 2021)

Selain itu kepatuhan yang dijalankan oleh pihak swasta yang selama ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada dan standar prosedurnya. Terkadang birokrasi yang terkesan sulit membuat pihak swasta merasa ambigu, karena pada prinsipnya birokrasi dilingkungan Pemprov DKI Jakarta khususnya dalam pengurusan pemberian izin pelampuan KLB memang melewati berbagai hal yang terbilang cukup lama dan panjang. Karena secara teknis terlebih dahulu melakukan kajian secara teknis yang kemudian dikoordinasikan kepada pimpinan eselon II. Jika mengikuti ETA yang sesuai dalam SOP Permohonan Persetujuan Prinsip Pelampuan KLB hanya membutuhkan 42 (empat puluh dua) hari kerja dalam proses penerbitan perizinan, namun terkadang ada hal lain yang tidak bisa diprediksi sehingga memakan waktu yang cukup lama. Jika memang berkas pengajuan Permohonan Persetujuan Prinsip Pelampuan KLB sudah dilengkapi sesuai dengan checklist persyaratan maka seharusnya tidak ada kendala lagi. Setelah berkas diterima oleh Petugas FO DPMPTSP maka petugas melakukan pengecekan awal kelengkapan persyaratan berkas, kemudian pengecekan lanjutan oleh tim penilai teknis, jika berkas lengkap akan dilakukan rapat pembahasan dengan perangkat daerah terkait (pra rapim), lalu melaksanakan rapim BKPRD, setelah dilakukan rapim akan dibuat surat pemberitahuan berupa nota dinas kepada Asisten Pembangunan sebagai eselon II untuk penetapan kompensasi. Selain itu dilakukan penyusunan PPK (Perjanjian pemenuhan Kewajiban) atas pelampuan KLB yang dikoordinasikan oleh Asbang LH dalam hal ini dilakukan (*freeze*) karena membutuhkan waktu yang cukup lama, setelah diterbitkannya PPK maka proses pengesahan dilakukan oleh pejabat dilingkungan DPMPTSP.

### **Ringkasan Faktor Konteks Kebijakan**

Gambaran diatas merupakan analisis data lapangan bahwa faktor konteks kebijakan bukan menjadi hal utama dalam menghambat implemetasi kebijakan dilingkungan Pemprov DKI Jakarta. Hal ini tentu saja berkaitan dengan tiga indikator yang telah digambarkan diatas **Pertama**, Dalam hal ini dilihat korelasinya terhadap pimpinan sangat menghargai satu sama lain. Tentunya hal ini dapat tergambarkan dari bagaimana setiap melaksanakan rapat koordinasi pemipin selalu dilibatkan baik dalam berpartisipasi maupun dalam pengambilan keputusan. proses nyata dalam setiap pelaksanaan kegiatan program serta bagaimana seorang pemimpin dapat memberikan contoh yang baik bagi para pegawainya khususnya dilingkungan Pemprov DKI Jakarta. Hal ini merupakan penjelesan dari Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat Kedua, Hal ini dapat tergambarkan dari berbagai kondisi lingkungan organisasi baik dari lingkungan eksternal maupun internal, dari masing-masing kondisi tersebut tentu akan menimbulkan kekuasaan yang berbeda-beda dalam menunjukan keseriusannya khususnya dalam melakukan upaya-upaya perbaikan program dari pemerintah, Hal ini merupakan penjelesan dari *karakteristik lingkungan organisasi atau rezim yang berkuasa. Ketiga, kepatuhan dan daya tanggap pelaksana.* Dalam hal ini berkaitan dengan struktur birokrasi yang terkesan sulit dan rumit sehingga membuat pihak eksternal merasa ambigu , karena pada prinsipnya

birokrasi dilingkungan Pemprov DKI Jakarta khususnya dalam pengurusan pemberian izin pelampauan KLB memang melewati berbagai hal yang ternilang cukup lama dan panjang. Menurut analisa temuan di lapangan telah dideskripsikan bahwa dari faktor konteks kebijakan Dari analisis temuan di lapangan yang telah dijabarkan di atas menunjukkan bahwa dari faktor konteks kebijakan khususnya pada analisa kepatuhan dan daya tanggap pelaksana menjadi yang faktor penghambat dalam implementasi kebijakan dilingkungan Pemprov DKI Jakarta. Artinya terdapat satu indikator dalam konteks kebijakan yang dapat menghambat implementasi kebijakan sehingga nanti untuk kedepannya akan dilakukan upaya perbaikan mengenai indikator tersebut khususnya dilingkungan Pemprov DKI Jakarta.

## KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka peneliti menulis kesimpulan atas dua pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya mengenai Peraturan Gubernur yang diterbitkan pada tahun 2016 terkait KLB dapat berjalan dengan baik. Karena memberikan sinergi yang berdampak saling menguntungkan antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Swasta dengan di bangun atau difasilitasi beberapa sejumlah sarana fasos dan fasum yang dapat digunakan oleh masyarakat. Prioritas bentuk kompensasi berupa penyediaan fasilitas publik lebih memprioritaskan terutama pada aset/lahan milik Pemprov DKI Jakarta berdasarkan kebutuhan disetiap wilayah sesuai dengan tujuan utama, yang telah diusulkan oleh setiap SKPD/UKPD.
2. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan khususnya mengenai Pergub tentang KLB di lingkungan Pemprov DKI Jakarta diantaranya ialah isi keberhasilan, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya tujuan yang akan dicapai tidak terperinci dan penerapan prioritas kebijakan terlalu umum. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan menunjukkan adanya kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan yang menyangkut sumber daya pendukung yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia, factor kedua ialah informasi, Kekurangan informasi akan lebih mudah menyebabkan adanya gambaran yang kurang tepat. Baik berhubungan dengan obyek kebijakan maupun kepada para pelaksana dari isi kebijakan yang akan dilaksanakan. Faktor yang ketiga ialah pembagian potensi, Penyebab tidak berhasilnya implementasi kebijakan ditentukan berdasarkan pembagian potensi diantara pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan perbedaan tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Apabila pembagian struktur organisasi tidak sesuai dengan tugasnya maka akan berdampak buruk.

## Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka peneliti menulis saran sebagai berikut:

1. Pada implementasi kebijakan , agar suatu permasalahan mendapatkan prioritas khusus dari beberapa pejabat dan pemerintah daerah setempat dengan mempertimbangkan sejumlah langkah terhadap suatu permasalahan dengan menjelaskan secara rinci dan mengidentifikasi

suatu permasalahan. Diperlukan pengembangan upaya agar dapat diterima dalam menyelesaikan suatu masalah, sehingga menghasilkan sebuah kebijakan yang disahkan oleh pemerintah. Diperlukan dukungan secara maksimal dari kalangan masyarakat agar kebijakan yang sudah diterbitkan dapat berjalan secara efektif dan efisien

2. Faktor komunikasi saat ini mempunyai peranan yang amat besar dan cukup berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan, oleh karenanya diperlukan komunikasi secara continue atau berjenjang antar lingkup SKPD guna menghasilkan keputusan yang optimal. Di lain hal kebijakan dapat mempengaruhi secara signifikan oleh isi kebijakan yang begitu kompleks, karakter lingkungan tempat kebijakan dilaksanakan, karakter pelaksana dan konteks kebijakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku dan Jurnal:

- [1]. Agustino, Leo. (2008). cetakan kedua. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- [2]. Cresswell, John. W. (2002) *Research Design: Design Penelitian*. Jakarta: KIK Pess.
- [3]. Grindle, Merilee S. (1980). *Politics and Policy Implementation in Third World*. New Jersey: Princetown University.
- [4]. Huang, K. (2016). *Population and Building Factors That Impact Residential Fire Rates in Large U.S Cities*, Texas State University-San Marcos, Texas
- [5]. Janda, Beery & Goldman. (1997). *The Challenge of Democracy*, Boston: Houghton Mifflin.
- [6]. Hupe, Michaeln and Peter Hupe (1980) "*Implementing Public Policy*", London: Sage Publications
- [7]. Keban, Yeremias T. (2007). *Pembangunan Birokrasi di Indonesia*, pidato pengukuran guru besar FISIP UGM: Yogyakarta.
- [8]. Kholifah, E. (2013). *Pemikiran kritis tentang Bureaucrat street level theory oleh Michael Lipsky*
- [9]. Lipsky M, 1980. *Street Level Bureaucracy : Dilemmas of the Individual in Public Service*. New York : Russel Sage Foundation
- [10]. Loomis, Berdett A. *A New Era: Groups and the Grass Roots*. Interest Group Politics. Washington, D.C.
- [11]. Nurmandi, Achamd. 2010. *Manajemen Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Sinergi Visi Utama
- [12]. Gordon (1986)
- [13]. Syarbaini, Syahrial. (2010). *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa*. Jakarta:Ghalia Indonesia
- [14]. Wahyudi, D. (2016). *Analisis Empris Pengaruh Aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia*. Jurnal Lingkar Widyaiswara 2 (4).

- [15]. Widaningrum, A. Street Level Bureaucracy: Dilemma Of Providers in Health Center. Departement of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Gadjah Mada University. Indonesia

**Sumber Website :**

- [16]. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta (2014). "Pengawasan Dana KLB". Jakarta: Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- [17]. <https://jpi.or.id/white-paper-perizinan/> diakses pada tanggal 30 Maret 2020 pada pukul 09.30 WIB.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

- [18]. Peraturan Gubernur Nomor 210 tahun 2016 tentang Pengenaan Kompensasi Terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan.
- [19]. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR-PZ).